



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 5%

Date: Thursday, June 13, 2019

Statistics: 354 words Plagiarized / 6651 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

JURNALISME WARGA: AWAL MULA DAN KEPENTINGAN YANG MELATARINYA Oleh: Aryo Subarkah Eddyono Mahasiswa Program Doktor Kajian Budaya dan Media Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Email: aryo.subarkah@gmail.com Faruk HT Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Email: farukkhan@ugm.ac.id Budi Irawanto **Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada** Email: birawanto@ugm.ac.id Abstrak: Praktik jurnalisme warga masih bisa ditemukan hingga kini, baik yang dikelola oleh media arus utama ataupun yang beredar di berbagai media sosial.

Jurnalisme warga adalah proses produksi informasi yang dilakukan warga biasa atas **peristiwa yang terjadi di sekitarnya** di berbagai media. Meskipun terlihat egaliter dan inklusif, pada kenyataannya praktik jurnalisme warga timpang dan diskriminatif. Artikel ini menunjukkan awal mula perjalanan jurnalisme warga **dan hal apa saja yang** melatarinya.

Penelitian ini bertujuan memberikan alternatif pandangan awal mula kehadiran jurnalisme warga, baik di dunia maupun di Indonesia. Data diperoleh melalui wawancara parapihak yang memahami sejarah awal jurnalisme warga, observasi, dokumen, serta kepustakaan. Jurnalisme warga mulai ramai diperbincangkan, diperdebatkan dan dikelola oleh beragam media pascaperistiwa tsunami 2004 yang melanda Asia Tenggara dan Timur.

Tapi jauh sebelumnya, praktik di mana warga menyampaikan informasi telah muncul sebelum profesi jurnalis dikenal, bahkan sebelum penerbitan modern muncul. Jurnalisme warga bisa jadi setua, bahkan lebih tua dari jurnalisme itu sendiri. Jurnalisme warga muncul karena kritik atas jurnalisme profesional yang partisan dan terlalu berorientasi pada pasar; perkembangan teknologi internet; dan situasi di mana

jurnalisme profesional sejak awal keberadaanya tidak bisa dilepaskan dari warga.

Di balik itu semua, kepentingan-kepentingan besar yang membayangnya adalah jurnalisme itu sendiri (jurnalisme profesional), demokrasi (kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat), serta pasar. Ketiganya saling terkait dalam memotivasi kehadiran jurnalisme warga. Kata Kunci: Jurnalisme Warga, Jurnalisme Profesional, Demokrasi, Kepentingan Pasar Abstract: The practice of citizen journalism can still be found today, whether managed by mainstream media or circulating on various social media.

Citizen journalism is the process of producing information that ordinary citizens do for events that occur around them in various media. Although it looks egalitarian and inclusive, in reality the practice of citizen journalism is lame and discriminatory. This article shows the beginnings of the journey of citizen journalism and what things are behind it.

This study aims to provide an alternative view of the initial presence of citizen journalism, both in the world and in Indonesia. Data was obtained through interviews with stakeholders who understood the early history of citizen journalism, observation, documents, and literature. Citizen journalism began to be widely discussed, debated and managed by various media after tsunami 2004 in Southeast and East Asia.

But long before, the practice in which citizens conveyed information had emerged before the journalist profession was known, even before modern publishing emerged. Citizen journalism can be as old as, even older as journalism itself. Citizen journalism arises because of criticism of professional journalism which is in favor of certain political interests and is too market-oriented; the development of internet technology; and situations where professional journalism from its inception cannot be separated from citizens.

Behind it all, the big interests that imagine it are journalism itself (professional journalism), democracy (freedom of expression and opinion), and markets. All three are interrelated in motivating the presence of citizen journalism. Keywords: Citizen Journalist, Professional Journalism, Democracy, Capital Pendahuluan Tahun 2004 silam, tepatnya pada tanggal 26 Desember, Cut Putri merekam peristiwa gempa bumi dan tsunami yang melanda tempat tinggalnya di Nanggroe Aceh Darussalam. Menurut keterangan waktu dalam rekamannya, saat itu menunjukkan pukul 08.13 WIB.

Video yang ditayangkan di Metro TV dan masih bisa diakses di Youtube ini, dimulai dengan penggambaran situasi kekagetan sejumlah anggota keluarganya. Mereka

berkumpul di halaman rumah pascagempa. "Aceh memang jalur gempa. Tapi yang tak seperti ini (biasanya)," kata salah seorang pria dalam rekaman itu. "Mobil goyang entah bagaimana," suara perempuan juga terdengar dalam rekaman tersebut.

Perbincangan seputar gempa yang dirasakan sangat kuat oleh anggota keluarga dan canda antarkeluarga masih mewarnai menit-menit awal rekaman video. Beberapa menit berselang, video menunjukkan situasi berbeda, tidak secair sebelumnya, berubah mencekam. Para penghuni rumah sudah berada di lantai dua rumah yang mereka tinggali.

Bunyi jerit histeris bercampur penyebutan nama Tuhan dan gemuruh suara air menjadi latar suara video. Tsunami melanda. Air deras dari laut melesak masuk ke daratan setinggi pohon kelapa dan menghancurkan segala benda yang menghalanginya. Tak tampak lagi jalanan, hanya genangan air tinggi membawa puing-puing. "Pegangan, pegangan, semua!" teriak seorang perempuan dalam rekaman itu.

Lantai satu rumah mereka ikut dipenuhi air. Air masuk bersama puing-puing. Hanya bagian atas tiang-tiang penyangga lantai dua sajalah yang masih terlihat. Perabot rumah mengapung ke sana ke mari mengikuti arus air. "Maaf lahir batin, Bang..." ujar perempuan lainnya disusul isak tangis anggota keluarga lainnya. Video masih menunjukkan betapa dahsyatnya tsunami yang melanda Aceh saat itu.

Menurut situs BMKG, gempa yang disusul tsunami tersebut berkekuatan 9,3 SR, berpusat di 3,3 LU – 95,98 BT. Tak hanya di Aceh, bencana tersebut juga melanda Malaysia, Thailand, dan beberapa wilayah lain di kawasan Samudera Hindia. Di Indonesia, terutama Aceh, tsunami tersebut telah merenggut 173.741 nyawa dan 116.368 orang dinyatakan hilang.

Sebanyak hampir setengah juta jiwa menjadi pengungsi, ribuan bangunan hancur. Dokumentasi yang dibuat Cut Putri dan sejumlah saksi mata lainnya pada bencana yang menimpa Asia Tenggara dan Timur tersebut, menurut Stuart Allan dalam wawancara oleh Hajek dan Stefanikova (2014), mendorong semakin meluasnya diskusi dan perdebatan mengenai jurnalisme warga di dunia.

Allan mengatakan bahwa pada peristiwa itu warga biasa bisa melakukan apa yang biasanya dilakukan jurnalis, yakni merekam dan melaporkan peristiwa, dengan gayanya yang khas. Memang, saat tsunami Aceh terjadi, infrastruktur rusak parah. Jaringan komunikasi dan akses masuk terputus. Informasi yang diperoleh hanya berasal dari pihak keluarga yang berada di luar lokasi bencana yang mempertanyakan kondisi keluarga mereka.

Dari situlah media melakukan penelusuran dengan mewawancarai segala pihak yang bekepentingan guna melakukan verifikasi informasi. Peliputan media terhalang jalur transportasi yang terputus itu. Jurnalis dari kantor biro berita terdekat, seperti Medan, harus mencoba menembus jalur agar bisa masuk ke lokasi bencana untuk mendapatkan informasi.

Di Jakarta, termasuk Medan, secara bertahap, dengan menumpang pesawat Hercules milik TNI, satu demi satu tim liputan dari berbagai media diberangkatkan. Sehingga tidak heran penggambaran saat peristiwa terjadi didominasi berasal dari dokumentasi warga, seperti yang dilakukan Cut Putri. Kalaupun ada jurnalis profesional yang memiliki gambar saat peristiwa terjadi, skalanya terbatas karena saat peristiwa mereka juga turut menjadi korban, termasuk juga keluarganya. Kantornya pun hancur diterjang tsunami. Infrastruktur komunikasi yang terputus menghambat penyampaian informasi ke jaringan media di luar Aceh.

Jurnalisme warga adalah praktik produksi dan penyebarluasan informasi yang berasal dari warga biasa yang disampaikan secara khas. Lasica (Agustus 7, 2003) menyebutnya sebagai model jurnalisme yang mengakomodasi siapapun (masyarakat biasa, bukan jurnalis profesional) untuk menyampaikan informasi atas peristiwa apapun (dan segala hal yang terkait dengan itu) di berbagai media, termasuk media pers profesional ataupun independen seperti blog.

Defenisi lain, jurnalisme warga merupakan praktik yang timpang dan diskriminatif (Eddyono et. al., 2019). Disebut timpang, karena tidak semua orang bisa mengaksesnya ataupun melakukannya. Terlibat dalam jurnalisme warga membutuhkan biaya dan kemampuan yang tidak dimiliki semua orang. Hanya orang-orang tertentu saja yang punya modal yang bisa melakukannya.

Hingga kini, praktik jurnalisme warga masih bisa dilihat bahkan media-media dominan memberikan ruang bagi warga dalam menyampaikan informasi. Ada Kompasiana, NET CJ yang tampil di berbagai program berita di NET TV, dan Metro TV juga masih mengelola konten jurnalisme warga meski Wide Shot tak lagi tayang. Tempo.co sempat menyajikan Tempo SMS untuk mengakomodir informasi warga, juga Indonesiana sebagai wahana bagi warga dalam menyampaikan beragam konten, termasuk konten jurnalisme warga. Indonesiana masih ada hingga kini.

Konten jurnalisme warga ditampilkan dalam sebuah kanal atau program khusus, atau jika memiliki modal yang besar media pers dominan akan menjadikannya sebagai unit bisnis sendiri (seperti Kompasiana ataupun Pasangmata). Tapi, sebenarnya sejak kapan

jurnalisme warga dan praktik yang menyerupainya mulai muncul, baik di dunia maupun di Indonesia? Apa yang melatarinya? Soal ini, dari hasil penelusuran peneliti, cukup beragam. Perbincangan soal jurnalisme warga memang telah banyak muncul di berbagai jurnal, termasuk membahas awal mula dan dinamikanya.

Artikel ini mencoba memberikan cara pandang lain dalam melihat awal kehadiran jurnalisme warga. Peneliti berupaya memberikan alternatif pijakan untuk memahami sejak kapan sesungguhnya praktik-praktik seperti jurnalisme warga telah berkembang sebelum akhirnya menjadi masif seperti saat ini. Harapannya, temuan ini bisa membantu, sedikit-banyak, memahami ulang pondasi dalam memahami jurnalisme warga.

Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data-data kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data berupa hasil wawancara terhadap paripihak yang memahami proses awal hadirnya jurnalisme warga. Observasi, baik online maupun offline, juga dilakukan untuk memperkaya data dan verifikasi. Termasuk juga melakukan studi pustaka dan dokumen pendukung.

Data-data yang terkumpul akan dianalisis sebelum akhirnya diambil kesimpulan. Pengambilan data dilakukan sejak 2017 hingga awal 2019. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan model validitas dialogis dan kontekstual ala Saikko. Saikko (2003:20) menjelaskan kriteria validitas dialogis adalah truthfulness, self-reflectivity, dan polivocality.

Truthfulness mensyaratkan sebuah penelitian haruslah adil dalam mengakomodir pandangan-pandangan di masyarakat, sekaligus memverifikasinya. Self-reflectivity berarti peneliti melakukan refleksi (sadar diri) atas siapa dirinya, termasuk wacana-wacana pribadi, sosial dan paradigmatik, sehingga mampu memosisikan diri baik. Upaya ini juga ditujukan untuk membantu memahami realitas masyarakat lain.

Polivocality berarti peneliti memahami bahwa yang diteliti pada hakikatnya bukanlah realitas yang tunggal sehingga berusaha memberikan ruang bagi pandangan-pandangan berbeda. Sementara itu kriteria validitas kontekstual mengarahkan peneliti agar menempatkan fenomena yang ditelitinya dalam konteks masa lalu dan masa kini, terutama untuk mengetengahkan ketimpangan-ketimpangan.

Temuan dan Pembahasan Jurnalisme Warga di Dunia Jika dirunut ke belakang, wacana keterlibatan warga dalam pemberitaan sebenarnya sudah mulai muncul sebelum bencana tsunami 2004. Bahkan, benihnya bisa dilacak sebelum praktik jurnalisme profesional berkembang di dunia. Allan lebih lanjut menyebut jika ingin mengetahui

asul-usul bagaimana warga terlibat dalam penyampaian informasi maka perlu melihat sejarah jurnalisme itu sendiri.

Allan (dalam Hajek dan Stefanikova, 2014), berasumsi bahwa praktik warga terlibat dalam penyampaian informasi sudah setara usia jurnalisme itu sendiri. Sementara Gillmor (2004) menyebut bahwa benih jurnalisme warga telah ada sejak 1700-an di mana warga menulis dan menyebarkan pandangannya melalui selebaran. Thomas Paine dan sejumlah anonim lainnya yang menulis pada Federalist Paper, oleh Gillmor, disebut sebagai warga pertama yang menyampaikan informasi di Amerika.

Thomas Paine adalah intelektual antikolonial Inggris. Tulisan-tulisannya, termasuk yang disebarluaskan melalui pamfletnya sendiri, *Common Sense*, memberi inspirasi bagi banyak orang agar kritis terhadap berbagai hal. Kalau ingin melacak lebih jauh lagi, praktik di mana warga (sebelum profesi jurnalis muncul) menyampaikan informasi bisa dilihat pada masa 100 SM di mana *Acta Diurna*, surat kabar pada masa kekaisaran Roma berupa kayu pipih yang ditempel di dinding setelah senat melakukan pertemuan, muncul.

Acta Diurna ini hanya memiliki satu sirkulasi. Tak ada ukuran pasti berapa banyak jumlah pembaca yang mengaksesnya (Baran, 2011:123-124). Penyebarluasan konten yang terdapat pada *Acta Diurna* dilakukan **dari mulut ke mulut** oleh siapa saja. Pendiri Kompasiana yang juga aktivis penyebarluasan informasi oleh warga, Pepih Nugraha (wawancara, 3 November 2017) mengatakan bahwa praktik warga menyampaikan informasi **dari mulut ke mulut** itu bisa jadi awal jurnalisme warga: "Catatan harian (*Acta Diurna*) yang sebenarnya waktu itu adalah komoditasnya para anggota parlemen.

Tapi, diantara mereka itu kan bisa ditonton, ada aja warga tuh yang ngelaporin itu. Ngelaporin hasil dari *Acta Diurna* ini... Bagaimana medianya? Ya, bisa jadi **dari mulut ke mulut** aja atau ya dia nulis selebaran (lalu) ditempel. Karena (saat) itu belum ada mesin cetak, toh... Dari zaman dulu sudah ada, mereka bukan wartawan, mereka warga biasa yang tergerak untuk menulis sesuatu karena minat... Nah minat, menguasai, tidak cukup mas untuk jadi jurnalisme warga kalau tidak ada rasa ingin berbagi.

Makanya disebut dalam satu judul *Citizen Journalism* yang saya tulis itu ada *Sharisme*. *Sharisme* itu sharing kekuatan..." (Pepih Nugraha, wawancara, 3 November 2017) Atau kalau mau lebih jauh lagi, praktik warga dalam menyampaikan informasi telah ada sejak zaman manusia menuliskan simbol ataupun gambar di dinding gua yang menceritakan kondisi kehidupan pada masa itu.

Asumsi ini muncul berdasarkan beragam pemahaman atau definisi bahwa jurnalisme

warga adalah praktik di mana warga menyampaikan informasi di sekitarnya dengan caranya yang khas untuk diketahui banyak orang. Gillmor (2004) menyebut praktik di mana warga terlibat dalam menyampaikan informasi sebagai *grassroot journalism*. Praktik semacam ini telah muncul di berbagai peristiwa, seperti pembunuhan JFK pada 1960-an di mana seorang warga berhasil merekam tragedi tersebut.

Pada tahun 1990-an seorang warga merekam penyiksaan warga kulit hitam, Rodney King, yang disiksa polisi kulit putih di Los Angeles yang berlanjut pada kerusuhan rasial (lihat juga Nugraha, 2012). Atton (2003) dengan *alternative journalism*-nya bahkan memberikan penawaran agar siapapun bisa menjalankan praktik jurnalisme di media warga sebagai bentuk kritik atas praktik jurnalisme arus utama yang menurutnya elitis.

Sementara Lasica (Agustus 7, 2003), begitu pula Bowman dan Willis (2003), telah menunjukkan bahwa praktik semacam ini – mereka menyebutnya *participatory journalism* – bisa dikelola dengan baik dengan beragam model meski saat itu masih banyak yang menentangnya, terutama dari kalangan jurnalis profesional. Secara teknis, Outing (Mei 31, 2005) mengemukakan lapisan demi lapisan praktik warga dalam menyampaikan informasi.

Selain jurnalisme warga, istilah sejenis yang kerap muncul untuk menunjukkan praktik warga dalam menyampaikan informasi ataupun menuliskan laporan peristiwa, yakni: *democratic journalism*, *open-source journalism*, *street journalism*, ataupun *participatory journalism* (Nugraha 2012:20; Allan, 2009). Pasca peristiwa tsunami 2004 yang melanda kawasan Asia Tenggara dan termasuk Asia Timur yang oleh Allan dianggap telah menjadi momentum bagi diskusi yang lebih masif lagi soal jurnalisme warga, pengakuan terhadap jurnalisme warga mulai mengalir seiring dengan perdebatannya, terutama soal kualitas dan menggeser peran jurnalis profesional. Setidaknya, banyak media, baik berbasis komersial maupun nonprofit, mulai menggarapnya. Pada masa itu fenomena blog juga tengah ramai-ramainya.

Berbagai peristiwa besar di dunia yang melibatkan warga sebagai penyampai informasi, juga perkembangan teknologi, mendorong masifnya praktik jurnalisme warga. Pada tahun 2007, saat terjadi peristiwa penembakan di Virginia Tech University, seorang mahasiswa bernama Jamal Albarghouti yang saat itu sedang berada di lokasi merekam peristiwa itu menggunakan ponselnya. Video itu lalu dikirimnya kepada CNN.

CNN kemudian menggunakannya dalam memberitakan kejadian tersebut dengan judul "Student Shot Video". Video yang direkam dari jarak 70 meter dinilai sebagai liputan terbaik pada saat kejadian penembakan tersebut (Hughes, 2010:1). Kehadiran internet, sebut Allan (masih dalam wawancara yang dilakukan Hajek dan Stefanikova, 2014) bisa

mendorong masyarakat memproduksi sebuah konten berita yang dapat digunakan oleh media arus utama sebagai sumber informasi. Hal ini memudahkan media dalam memproduksi berita.

Meskipun jurnalis tidak bisa langsung datang ke lokasi kejadian, media bisa terhubung menggunakan teknologi itu. Mengapa **jurnalisme warga saat ini** mendapat tempat di arena informasi? Selain perkembangan teknologi, terutama internet, yang semakin memudahkan praktik ini dilakukan, **ada hal lain yang membuatnya** sulit ditolak, yakni keberadaan warga yang melekat pada jurnalisme dan kritik terhadap praktik jurnalisme profesional yang utamanya mengabaikan peran warga. Faktor lainnya adalah persoalan untung-rugi yang potensial diraih.

Warga dalam praktik jurnalisme, menurut Campbell (2014), bisa dilihat dalam dua kategori, yakni jurnalisme sebagai praktik kewarganegaraan dan jurnalisme untuk kewarganegaraan. Jurnalisme untuk kewarganegaraan, yang oleh Campbell merupakan model klasik, mengarah pada fungsi pers dalam menyediakan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan buat publik.

Sementara itu, jurnalisme sebagai kewarganegaraan merujuk pada pendapat bahwa jurnalisme merupakan wahana bagi warga dalam menikmati informasi secara aktif. Dalam situasi ini warga memiliki kesempatan memproduksi informasi, sekaligus menikmatinya. Oetama (1989:13) menyebut bahwa khalayak adalah rekan pers yang sangat penting sehingga ikut memengaruhi kebijakan pers (warna, isi, dan gaya).

Pers tidak bisa asyik sendiri, tanpa memikirkan khalayaknya. Oetama (2004:36) menganggap bahwa pers adalah mitra masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan. Pers berupaya, sebisa mungkin, dengan teknologi yang dimilikinya menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Tujuan idealnya adalah agar masyarakat mendapatkan pencerahan dalam menjalani hidupnya. Dalam konteks Indonesia, UU Pers No.

40/1999 sangat menaruh perhatian bahwa pekerjaan **pers tak bisa dilepaskan dari** masyarakat. Masyarakat dapat berperan serta dalam pers sebagai pemantau dan pelapor kinerja pers serta memberi masukan **kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga** kualitas pers Indonesia (pasal 17 ayat 2). Jadi, tak hanya sebagai penikmat informasi, warga juga diposisikan sebagai pengawas pers itu sendiri.

Tanpa publik, warga, khalayak, atau apapun istilahnya, pers tak ada artinya. Kovach dan Resenstiel (2001:56) bahkan menegaskan bahwa jurnalisme harus loyal kepada warga, apapun yang terjadi. Warga adalah "tuan" bagi jurnalisme itu sendiri. Apapun informasi

yang diketengahkan jurnalisme idealnya bertujuan untuk kebaikan dan pencerahan warga.

Kerja-kerja pers, menurut Kovach dan Rosenstiel (2001:11-12) sejatinya untuk membangun kewarganegaraan (citizenship), sekaligus memenuhi hak-hak sipil warga negara demi demokrasi. "Tujuan utama jurnalisme adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup merdeka dan mengatur diri sendiri," jelas Kovach dan Rosenstiel (2001:12). Pada perjalanannya pers mendapat kritik karena terlalu berorientasi pada pendapatan. Terutama jika pers hanya dikuasai sedikit orang.

Bagdikian (2004) menekankan akan bahayanya jika media massa dikuasai hanya segelintir orang. Jika ini terjadi maka akan berdampak buruk pada demokrasi dan jurnalisme. Ia mengamati bahwa ruang redaksi yang dikontrol oleh kekuasaan pemilik modal akan menghasilkan produk jurnalistik yang berorientasi pada pasar. Ketika masyarakat masih menjadikan media arus utama sebagai sumber informasi di mana informasi tersebut sangat dekat dengan kepentingan pasar, maka keberagaman informasi hanya menjadi mimpi. Terkonsentrasinya media pada sedikit orang juga berakibat pada gampangnya informasi diarahkan demi tujuan-tujuan politik media dan pemiliknya.

Bagdikian lebih lanjut mengatakan bahwa perusahaan media memiliki anggaran yang tak sedikit untuk membedah dan menyerang balik berita-berita yang tidak mereka sukai. Kaitan bagaimana konglomerasi media bisa berdampak buruk bagi jurnalisme juga dijelaskan oleh Kovach dan Rosenstiel (2001:32). Menurutnya, akar dari kebebasan pers adalah independensi, yang berarti bebas dari sensor atau kontrol pemerintah dalam menyampaikan berita.

Saat ini, hal tersebut bisa diperluas menjadi bebas dari tekanan pemilik media, pemasang iklan, partai politik dan sebagainya. Namun ketika konglomerasi media semakin menjadi-jadi, maka akan mengancam keberlangsungan jurnalisme itu sendiri. Praktik jurnalisme yang sejatinya independen dari tekanan pemilik modal, kini diarahkan untuk mementingkan modal daripada publik.

McChesney (1999) menyebutkan bahwa ketika media semakin kaya, maka demokrasi akan terancam. Keberagaman informasi dan lokalitas semakin hilang diganti dengan informasi yang populis dan seragam. Padahal, keberagaman informasi merupakan ciri dari demokrasi itu sendiri.

McChesney (2008) memberikan gambaran yang lebih detail bagaimana demokrasi dirusak oleh praktik jurnalisme di Amerika Serikat. McChesney menyebutkan bahwa

jurnalisme di Amerika telah gagal menjalankan perannya sebagai “anjing penjaga” atau pengawas kinerja kekuasaan dalam konteks demokrasi. Penyebabnya adalah serangan-serangan komersialisasi yang gencar dilakukan kepada jurnalisme.

Lebih lanjut, McChesney (2008) mengatakan pada sejarah pers di Amerika praktik media partisan telah terjadi dan saat ini berkembang menjadi partisan-kapitalistik. Surat kabar pada masa itu dijadikan media propaganda partai atau faksi-faksi tertentu, meski tidak sampai “sejahat” media pada masa Nazi dan Stalin yang kaku dan tidak mengakomodir banyak suara. Pada masa itu pula, periklanan masih belum tumbuh seperti saat sekarang ini.

Singkat kata, jurnalisme partisan akhirnya begeser pada jurnalisme yang bertujuan komersil. Masa ini ditandai dengan kehadiran pengusaha yang sadar bisa mengambil keuntungan dalam penerbitan surat kabar. Pada abad ke-19, industri surat kabar tumbuh dengan tingkat persaingan yang tinggi. Jurnalisme partisan tidak begitu saja hilang, ia tetap ada.

Tapi geraknya tidak jauh-jauh pada logika untung. Arah jurnalisme berubah menyenangkan para pengiklan. Sehingga berita yang dihasilkan sebisa mungkin bisa menarik iklan, dibandingkan menghadirkan jurnalisme yang menantang. Jurnalisme dituntut mengabdikan pada kepentingan pemilik modal, pemasang iklan, sekaligus publik.

Ini menjadi konteks hadirnya jurnalisme profesional yang menegaskan bahwa ruang redaksi sebaiknya tidak dipengaruhi agenda politik pemilik modal, pemasang iklan, editor, bahkan jurnalis itu sendiri. Jargon objektivitas dan netralitas menjadi jargon yang didengung-dengungkan kala itu. Pada praktiknya jurnalisme profesional hanya menyoroiti kebusukan kekuasaan politik, tidak pemilik modal maupun pengiklan.

Hal-hal buruk menyangkut pemilik modal diabaikan, termasuk afiliasi politiknya. Bahkan liputan yang dilakukan terasa dangkal karena para jurnalis lebih memilih informasi yang datang dari pernyataan resmi pemerintah dan kalangan bisnis sebagai berita yang bernilai. Kegiatan semacam ini tentu saja tidak membutuhkan energi yang besar dan sangat menguntungkan dari pada melakukan peliputan investigasi.

Di sisi lain, model peliputan semacam ini memberikan peluang besar bagi politisi dan figur publik memanipulasi informasi karena mereka tahu bahwa mereka menjadi sumber berita yang penting. Dampaknya, masyarakat sulit mendapatkan informasi secara jelas dan kritis. Tatkala pemilik modal begitu bernafsu mengejar keuntungan, maka bisnis media digunakan untuk menampung beragam iklan. Apapun akan dijual demi akumulasi kapital.

Situasi ini akan menjadi sangat parah ketika media hanya dimiliki segelintir orang tertentu. McChesney (2008), mengutip Walter Cronkite, dalam konteks pemberitaan TV, tekanan komersialisasi telah mengubah jurnalisme (TV) menjadi suatu pendangkalan. Berita yang disajikan, seperti feature misalnya, penuh dengan omong-kosong.

Berita tidak lagi ditentukan oleh kepentingan publik, melainkan **kepentingan pemilik modal dan** pemasang iklan. Fakta lain adalah, masih merujuk McChesney (2008), demi prinsip efisiensi, jurnalis dipecah dan berita diambil dari sindikasi yang biayanya jelas lebih murah daripada menggaji jurnalis untuk meliput. Campur tangan pemilik media dalam ruang redaksi, langsung maupun tidak, juga menjadi-jadi.

Dampaknya adalah sikap kritis yang harusnya melekat kuat pada sikap jurnalis menjadi lumpuh. Dengan semakin sedikitnya jurnalis (yang kritis), dana yang dihemat, gaji dan moral yang semakin rendah maka jurnalisme hanya menyajikan liputan ala kadarnya. Situasi jurnalisme di Amerika **seperti yang telah dijelaskan di atas**, mirip dengan situasi di Indonesia.

Beberapa media besar dimiliki segelintir orang yang **haus akan kekuasaan dan** akumulasi kapital. Ruang redaksinya tak lagi menjadi ruang steril yang bisa lepas dari campur-tangan pemilik. Jika si pemilik tertarik berpolitik maka ia akan menggunakan mediana agar tujuan politiknya tercapai.

Namun jika si pemilik tidak begitu tertarik berpolitik, maka ia akan menggunakan mediana untuk kepentingan akumulasi kapital, sebesar-besarnya. Di sisi lain, sebagian besar jurnalis Indonesia juga masih diberi upah di bawah standar. Cara berpikirnya dirombak untuk mengangkat peristiwa-peristiwa yang berpotensi dibaca, ditonton dan didengar khalayak, sehingga berita-berita yang tidak termasuk dalam kategori bernilai akan disingkirkan. Berita-berita populer mendominasi.

Jangan berharap pada liputan-liputan investigasi karena ruang redaksi akan memilih peliputan yang murah dan mampu mendulang pembaca serta tidak menyinggung parapihak yang memberikan keuntungan bagi redaksi. McChesney (2013) juga menunjukkan bahwa bahwa praktik jurnalisme di ranah online erat kaitannya dengan persoalan konglomerasi, untung-rugi, kualitas jurnalisme, dan rusaknya demokrasi. Kehadiran internet juga belum mampu memberikan jawaban atas masalah jurnalisme yang selama ini telah hadir.

Penurunan kualitas jurnalisme masih saja terjadi. Praktik jurnalisme yang dianggap berkualitas, seperti investigasi terus menyusut, jika enggan menyebutnya menghilang.

Kualitas jurnalis profesional, bahkan dalam format digital, sudah sulit dilepaskan dari logika pendapatan (iklan). Apa yang dikemukakan oleh McChesney ini menguatkan pemahaman saya bahwa kehadiran internet tidak serta merta bisa memperbaiki situasi jurnalis profesional yang sebelumnya memang bermasalah, termasuk soal konglomerasi media. Internet dengan logika kerjanya, pada praktiknya mulai menghancurkan jurnalis profesional itu sendiri.

Atas nama kecepatan, sejumlah jurnalis enggan melakukan verifikasi atas berita yang dilaporkannya. Bahkan, karena tingginya target berita tayang yang dituntut oleh redaksi, mereka pun enggan mendalami peristiwa. Tapi bukan berarti kehadiran internet selalu bermasalah. Melalui internet pula, McChesney (2013:194-197) menyebut ada upaya-upaya alternatif yang dilakukan oleh kalangan nonjurnalis profesional dalam menyampaikan informasi yang penting buat publik melalui platform blog, bukan melalui media online komersial.

Fenomena Wikileaks adalah contoh yang mengejutkan bagi banyak pihak, terutama jurnalis profesional yang harus ekstra keras memeriksa materi sekaligus menerjemahkan data-data ke dalam bahasa yang lebih populer. Penguasa yang merasa terkait dengan skandal yang diungkap dalam Wikileaks juga sulit menahan peredaran informasi itu. Ada juga media nirlaba ProPublica ber-platform online berisi jurnalis-jurnalis hebat yang pernah bekerja di media komersial.

Media ini berhasil mendapatkan sejumlah penghargaan bergengsi, termasuk Pulitzer, atas pemberitaan berkategori pelayanan publik. Teknologi internet, meskipun awal peruntukannya kepada publik demi tujuan komersial, sangat mungkin digunakan untuk tujuan-tujuan kepentingan publik dan nonkomersial. Upaya-upaya ini bisa dibaca sebagai bentuk kritik atas kerja jurnalis profesional di media-media komersial yang memprihatinkan.

Siapa pun bisa bersiasat memanfaatkan internet yang sarat dengan praktik-praktik kapitalistik untuk menyampaikan pesan-pesan tandingan. Kembali pada persoalan jurnalis profesional, kehadirannya tak terlepas dari konsep warga yang melekat pada jurnalis profesional dan karena perkembangan teknologi internet, disertai praktik jurnalis profesional yang bermasalah, maka pilihan pelibatan warga dalam mengelola dan menyampaikan informasi menjadi lebih terbuka.

Kehadirannya juga didukung oleh semangat memberikan informasi alternatif yang tidak atau jarang diangkat oleh jurnalis profesional karena alasan propasar. Menurut catatan Hughes (2010:7-18), hingga tahun 1988 masyarakat, masih dalam konteks Amerika Serikat, merasa tidak percaya pada media arus utama. Ditambah lagi kesinisan

masyarakat terhadap politik di Amerika pada masa itu.

Akhirnya, karena kritik terus bermunculan dari berbagai kalangan, termasuk dari akademisi dan jurnalis, media arus utama mencoba untuk memproduksi berita yang berguna untuk kepentingan masyarakat umum. Wartawan menjadi lebih aktif dalam memberitakan suara rakyat dan keberagaman budaya di Amerika. Dari sanalah muncul istilah **civic journalism (jurnalisme publik)**.

Namun civic journalism ini tidak bertahan lama karena pada praktiknya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Meskipun demikian, kehadiran praktik dan wacana civic journalism ini menumbuhkan konsep jurnalisme warga di masyarakat. Banyak aktivis pada masa itu membuat web yang mengizinkan masyarakat untuk ikut berpendapat dan memberikan informasi. Dari sinilah tren jurnalisme warga muncul.

Kovach dan Rosenstiel (2001:30) mengatakan bahwa teknologi baru bersama dengan globalisasi dan konglomerasi media menimbulkan pergeseran model jurnalisme dari profesional ke warga sehingga kondisi ini diharapkan bisa mendukung demokrasi, terutama dalam konteks kebebasan berpendapat. Jurnalisme profesional harus mendefinisikan ulang keberadaannya dan beradaptasi selekasnya jika tidak ingin digeser dari posisi dominannya.

Tapi, menurut saya dan nantinya akan terlihat dalam penelitian ini, ketika jurnalisme profesional mulai beradaptasi dan merangkul atau turut mengelola jurnalisme warga, yang terjadi selanjutnya adalah praktik eksploitasi terhadap jurnalisme warga. Jurnalisme warga dikelola bukan sekedar untuk mengakomodir kebutuhan publik dalam berpartisipasi menyampaikan informasi (pembuat sekaligus penikmat), tapi juga untuk tujuan-tujuan ideologis dan ekonomi-politis.

Jurnalisme Warga di Indonesia Praktik **jurnalisme warga di Indonesia** mulai berkembang seiring berkembangnya wacana jurnalisme warga di dunia. Argumen ini bukan berarti menganggap bahwa jurnalisme warga di Indonesia adalah praktik yang baru. **Jurnalisme warga di Indonesia**, jika merujuk pada argumen yang lebih cair bahwa jurnalisme warga setua jurnalisme itu sendiri bahkan lebih lama – termasuk juga argumen bahwa praktiknya merupakan aktivitas warga dalam menyampaikan beragam informasi dengan gayanya yang khas, mulai bisa dilacak sebelum kegiatan jurnalisme di dunia muncul.

Penemuan-penemuan prasasti kuno dan kitab-kitab kuno mungkin bisa dijadikan pertimbangan, termasuk aktivitas kaum terpelajar Indonesia dan para pedagang dalam menyampaikan informasi pada masa penjajahan kolonial Belanda melalui pamflet-pamflet dan penerbitan. Di Indonesia, keterlibatan warga dalam menyampaikan

informasi bisa dilacak pada masa penjajahan kolonial Belanda.

Saat itu siapa saja dari beragam kalangan mencoba menyampaikan informasi maupun opini di berbagai penerbitan (Adam, 1995). Namun, pada bagian ini saya tidak akan mengupas hal tersebut lebih jauh karena membutuhkan riset yang mendalam lagi. Saya akan fokus membahas dinamika jurnalisme warga Indonesia pasca terminologi jurnalisme warga mulai ramai didiskusikan, yakni di awal-awal tahun 2000-an dan semakin hangat pasca bencana tsunami 2004. Pada masa ini, internet mulai masif.

Menurut Hill dan Sen (2005:56-57), internet di Indonesia mulai berkembang sekitar pertengahan 90-an. Menurut Hil dan Sen, penggunaan internet pada saat itu terbatas hanya untuk kalangan terbatas saja. Terhitung ada 15 ribu pengguna internet dan 5 ISPs pada masa itu.

Lalu, pada pertengahan 1996, pengguna internet menjadi bertambah menjadi 110 ribu pengguna dengan 15 ISPs. Selanjutnya, pada Mei 1997 **pengguna internet di Indonesia meningkat** menjadi 348 ribu pengguna. Pemerintah juga telah mengeluarkan izin pada 41 ISPs dimana 38 diantaranya beroperasi.

Pada 1998 pertumbuhan **pengguna internet di Indonesia** mengalami perlambatan karena krisis moneter melanda. Setahun berikutnya, **Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet** Indonesia (APJI) mengklaim **pengguna internet di Indonesia meningkat** drastis pada tahun 1999 mencapai satu juta pengguna dengan 250 ribu subscribers berbayar.

Seiring waktu, **pengguna internet di Indonesia** terus bertambah hingga tahun 2004 tercatat pengguna mencapai 12 juta. Salah satu dampak perkembangan internet adalah mulai bermunculan media-media online, termasuk blog. **Jurnalisme warga di Indonesia**, menurut Wedhaswary (2008), meski sudah mulai diakomodir oleh media TV dan radio dalam skala terbatas pascareformasi, semakin berkembang pesat ketika media-media online mulai tumbuh. Website dan weblog, menurutnya, mampu menawarkan pola komunikasi yang interaktif.

Sehingga tercipta ruang bagi warga menyampaikan aspirasinya secara lebih bebas dan luas. Menurut catatannya, media-media berbasis online yang mengakomodir jurnalisme warga di fase ini adalah Panyingkul.com, Wikimu.com, Halamansatu, Sumbawanews, dan KabarIndonesia **yang dikelola dari Belanda**. Semuanya berbasis web.

Catatan lain menyebut, cikal bakal jurnalisme warga berbasis web adalah Apakabar, Rumahkiri, dan Kilasan (Adiputra via Ningtyas, 2014). Dari semuanya, hanya KabarIndonesia **yang masih eksis hingga** kini. Apakabar yang hadir pada 90-an adalah

forum berbasis internet yang dimoderatori oleh MacDougall di Maryland, Amerika Serikat. Apakabar berhenti pada tahun 2002.

Apakabar, menurut Hill dan Sen (2001:234-235), menjadi pengganggu terbesar bagi pemerintah Indonesia pada masa itu dalam upayanya mengontrol informasi. Forum ini menjadi wahana penyeberluasan informasi yang penting bebas sensor, bahkan menjadi rujukan bagi aktivis dan pers di masa itu. Geliat **jurnalisme warga di Indonesia** pada masa itu masih sebatas eforia bahwa jurnalisme warga adalah praktik penyeberluasan informasi yang mungkin dilakukan siapa saja, di mana saja, **dan kapan saja tanpa harus** tergantung pada media dominan dan kontrol negara.

Sementara, perdebatan soal perlindungan hukum, persaingan dengan jurnalis profesional, dan etika masih belum tuntas. Pada 2012, Tempo Institute “mengumpulkan” berbagai media-media yang mengelola jurnalisme warga termasuk individu-individu yang terlibat aktif dalam penyeberluasan informasi. Peserta diajak berdiskusi seputar jurnalisme warga selama dua hari, 14 – 15 April, di Museum Nasional Jakarta dalam tajuk Festival Jurnalisme Warga.

Direktur Tempo Institute Mardiyah Chamim (wawancara, 28 Oktober 2017) mengatakan bahwa acara yang didanai oleh World Bank ini merupakan bentuk kampanye pemantauan kebijakan publik yang akuntabel dan transparan melalui praktik jurnalisme warga. Komunitas-komunitas yang terlibat dalam praktik penyeberluasan informasi di akar rumput dari berbagai wilayah di Indonesia diundang hadir.

“Nah, kita ketemu dan membahas, kayaknya perlu festival, deh. Biar teman-teman yang bercerita praktek di lapangan kayak apa modelnya,” jelasnya. Sebagai pemantik acara tersebut, sebuah akun Twitter @ayobersuara dibuat oleh panitia pada Maret 2012. Aktivitas akun ini terhenti pada retweet terakhir pada akun @Menjadi_ID yang berkicau tentang ucapan selamat mudik 2013 dan mengajak melakukan pantauan sepanjang jalur perjalanan menuju kampung halaman. Media sosial seperti Twitter ini digunakan untuk menampung informasi dari warga, terutama mengenai fasilitas publik.

“Nah, cuma dalam pemahamannya itu kan butuh effort ya untuk merawatnya. Awal-awal sih cukup lumayan (aktivitasnya), misalnya ketika isu air muncul. Nah belakangan sudah engga,” jelas Mardiyah. Dalam acara itu, diskusi soal problematika jurnalisme warga kembali mengemuka. **Salah satunya adalah persoalan** ketimpangan informasi di media-media arus utama yang kurang memberi ruang atas isu lokal, sementara ada banyak hal-hal positif yang terjadi di daerah yang penting diinformasikan. Jurnalisme warga dianggap penting karena mampu menyuarakan yang tidak tersuarakan.

Keberadaannya penting bagi demokratisasi informasi dan sebagai penyeimbang informasi. Selain itu, persoalan etika yang perlu dilekatkan pada praktik jurnalisisme warga juga tak luput didiskusikan dalam festival tersebut. "Saya ingat itu teman-teman menyepakati bahwa harus ada rambu-rambu soal etika jurnalistiknya.

Artinya soal cover both side, soal ya etika-etika jurnalistik yang berlaku umum itu juga harus dipahami oleh teman-teman jurnalisisme warga," jelas salah satu panitia, Budi Hermanto (wawancara, 9 November 2017). Selain persoalan etika, pengakuan terhadap warga yang terlibat dalam penyebaran informasi masih menjadi persoalan. Namun setidaknya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia telah memulai menerima kontributor warga termasuk juga blogger sebagai anggotanya sejak 2014.

Penerimaan ini didasarkan pada keputusan Kongres Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia ke-IX di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 27-29 November 2014. Kongres ini menyepakati menerima jurnalis warga sebagai anggota dengan sejumlah syarat tertentu. Sebelumnya, keanggotaan AJI Indonesia hanya terbatas pada jurnalis media arus utama.

Mantan Ketua AJI Indonesia, Suwarjono (wawancara, 2 November 2017) mengatakan bahwa penerimaan ini terkait dengan semangat AJI di masa lalu yang menolak segala bentuk pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat. AJI, jelas Suwarjono, mempunyai sikap bahwa setiap orang bebas membuat karya jurnalistik tanpa harus berada dalam satu media, terutama media-media arus utama: "Ada teman-teman yang tidak punya media sendiri... tetap dia harus diakui memang, sepanjang karyanya (memenuhi) standar jurnalistik.

Mau dia ditulis dalam platform Facebook, mau ditulis di Twitter, atau masuk di Instagram, atau di blog, atau di (media) jurnalisisme warga tempat yang lain, sepanjang karyanya adalah memang karya-karya jurnalistik, bisa diakui sebagai jurnalis dan itu bisa masuk menjadi anggota AJI." (Suwarjono, wawancara, 2 November 2017) Sebelum keputusan itu dibuat, perdebatan serius mengemuka di antara anggota dan pengurus AJI.

Isu yang mencuat adalah sejauh mana perlindungan yang bisa diberikan tatkala AJI menerima blogger sebagai anggotanya. Perlu dipahami bahwa praktik jurnalis profesional di Indonesia dilindungi oleh UU Pers No. 40/1999. Jika terjadi sengketa pers, sudah ada mekanisme hukumnya. Sementara, jika blogger bergabung menjadi anggota AJI maka perlindungan hukumnya perlu dipertegas: "Undang-Undang Pers yang ada di kita ini adalah, mereka baru bisa melindungi karya-karya yang masuk di media mainstream, mempunyai badan hukum, mempunyai unit usaha industri.

Sementara kalau mereka masuk ditampilkan sebagai blog, media sosial, (maka) karya-karya mereka apabila menghadapi perselisihan pemberitaan, tidak ada, tidak diatur, tidak diakui, dan tidak masuk di ranah Undang-Undang Pers, dan Dewan Pers tidak bisa memediasi, melindungi mereka. ...perdebatannya adalah di situ." (Suwarjono, wawancara, 2 November 2017) Bagi jurnalis warga **agar bisa menjadi anggota** AJI harus memiliki 12 karya jurnalistik dalam setahun terakhir disertai rekomendasi dari anggota AJI dan sejumlah syarat lainnya. pengurus AJI di tiap kota akan menyeleksinya.

Jika lolos, maka pelamar akan diundang untuk wawancara dengan pengurus AJI di masing-masing kota. Upaya AJI jika ternyata anggotanya yang merupakan jurnalis warga tertimpa perkara pers adalah berupaya melakukan advokasi di berbagai lini. Salah satu upaya adalah AJI akan meminta bantuan Dewan Pers untuk memediasinya: "Selama ini yang kami carikan cantolan memang undang-undang yang tertinggi, pasal 28F UUD 1945 (tentang) kebebasan berekspresi. Ya, isunya terkait dengan kebebasan berekspresi, ya. Karena Undang Undang Pers memang tidak bisa (digunakan).

Tapi juga, **tidak menutup kemungkinan kami** melakukan lobi-lobi ke Dewan Pers, untuk mengajak Dewan Pers sadar kalau namanya produk jurnalistik ya tetap harus dihargai (sebagai) sebuah (karya) jurnalistik. Meskipun dia platform-nya berbeda. Meskipun ini cukup berat. Terutama apabila ditampilkan di media sosial. Misalnya di Facebook, di Youtube, dan lain-lain. Dewan Pers memang tidak masuk dan tidak mau.

Tapi kalau tampilannya di website, blog yang independen, meskipun tidak punya badan hukum, dia (Dewan Pers) masih bersedia melakukan mediasi." (Suwarjono, wawancara, 2 November 2017) Meskipun praktik jurnalisme warga mulai mendapat tempat, persoalan perlindungan hukum jika terjadi sengketa masih menghantuinya. AJI yang telah menerima keberadaan jurnalisme warga, namun tidak mampu menjamin sepenuhnya perlindungan hukum jika anggota yang berlatar nonjurnalis di media arus utama tertimpa sengketa.

AJI hanya menjanjikan upaya yang serius untuk mengadvokasi kasus dengan menjalin kerja sama antarlembaga yang memiliki fokus pada kebebasan berekspresi, seperti **Lembaga Bantuan Hukum (LBH)** Pers. Penyelesaian sengketa akan terasa lebih mudah jika menggunakan UU Pers. Namun, sekali lagi, praktik jurnalisme warga tidak masuk ke dalam ranah pers sehingga tak bisa dilindungi dengan UU Pers.

Di wilayah media arus utama, pengelolaan jurnalisme warga terus muncul dan berkembang, silih berganti. Metro TV, misalnya, setelah tak lagi menjalankan program Wideshot, redaksi masih terus mengakomodir informasi dari warga yang tayang di

beragam program. Radio Elshinta, yang oleh Kurniawan (2007) dianggap mulai menjalankan praktik jurnalisme warga sejak awal 2000-an, masih terus mengembangkan program IdA (Informasi dari Anda).

Menurut Wakil Pemimpin Redaksi Radio Elshinta, Haryo Ristamadji (wawancara, 17 Juli 2018) IdA, program yang mengakomodir beragam informasi dari pendengar Elshinta, mampu menjaga stabilitas eksistensi Radio Elshinta hingga kini. Informasi yang berasal dari warga ini membuat Elshinta semakin dekat dengan pendengarnya. NET TV, sebagai TV pendatang baru di Indonesia, masih memelihara program NET CJ, program yang mengakomodir video yang berasal dari warga.

Produser Senior NET CJ, Thomas Herda (wawancara, 18 Juli 2018) mengatakan bahwa potensi kontribusi warga dalam menyampaikan informasi berupa video masih besar. Program-program berita NET TV semakin kaya dan terbantu dengan hadirnya video informasi dari warga. Pendatang baru portal berita IDNTimes juga mendapat berkah dari pengelolaan konten warga yang mereka sebut sebagai community content.

Redaktornya, Ernia (wawancara, 1 Agustus 2018) menyebut bahwa konten warga memasok hampir setengah konten keseluruhan di IDNTimes. Timnya berupaya memilah-milah konten terbaik yang berpotensi mendulang trafik untuk ditampilkan. Konten warga begitu menjanjikan bagi media arus utama. Kesimpulan Jurnalisme warga mulai ramai diperbincangkan, diperdebatkan dan dikelola oleh beragam media pasca peristiwa tsunami 2004 yang melanda Asia Tenggara dan Timur. Sebelumnya telah ada diskusi-diskusi mengenai keterlibatan warga dalam proses produksi berita.

Saat itu istilah yang muncul menggambarkan keterlibatan warga adalah participatory journalism, democratic journalism, civic journalism, bahkan alternative journalism. Prinsipnya pada dasarnya sama, yakni mengutamakan keberpihakan pada publik dan melibatkannya sebagai subjek informasi yang aktif. Namun jauh sebelum itu, pola-pola semacam ini sebenarnya telah muncul.

Terutama jika menggunakan defenisi bahwa jurnalisme warga adalah praktik di mana warga, siapapun tapi bukan jurnalis profesional, menyampaikan informasi dalam media apapun. Acta Diurna bisa dijadikan pertimbangan bahwa warga (karena pada saat Acta Diurna muncul profesi jurnalis belum ada) telah terlibat dalam proses penyampaian informasi pada masanya.

Ataupun catatan dan prasasti kuno zaman kerajaan di nusantara, juga lukisan-lukisan di gua di zaman purbakala bisa didiskusikan untuk melihat praktik penyebaran informasi oleh siapapun. Asumsi ini muncul dengan menempatkan defenisi jurnalisme warga yang

cair tanpa batas-batas apapun, misalnya sesudah aksara dikenal ataupun penerbitan masa lalu lahir.

Kehadiran yang masif jurnalisme warga tak lepas dari kritik terhadap jurnalisme profesional yang partisan dan terlalu berorientasi pada pasar sehingga keberpihakan pada publik dinomorduakan. Faktor lainnya adalah perkembangan teknologi internet yang memungkinkan siapa saja mengakses dan memproduksi informasi. Namun yang tak bisa dipungkiri bahwa jurnalisme sendiri sudah sejak awal diposisikan tidak boleh lepas dari warga, baik sebagai khalayaknya, arah redaksi, maupun kapasitasnya dalam menyampaikan informasi.

Kepentingan-kepentingan yang muncul dari proses awal kehadiran jurnalisme warga adalah jurnalisme itu sendiri (jurnalisme profesional), demokrasi (kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat), serta pasar. Ketiganya saling terkait satu sama lain. Keberadaan jurnalisme profesional takkan bisa berjalan baik tanpa kehadiran demokrasi. Sementara demokrasi membutuhkan jurnalisme yang profesional sebagai kontrol kekuasaan dan wahana beragam pendapat.

Tanpa pasar, jurnalisme profesional takkan bisa menjalankan perannya dengan baik demi publik. Sayangnya, meski telah diakui dan dipelihara jurnalisme profesional (prinsip-prinsip jurnalisme profesional dipakai dalam mengelola konten jurnalisme warga), posisi jurnalisme warga tidaklah sebaik jurnalisme profesional yang keberadaannya telah diakui oleh UU Pers. Jurnalisme warga bukanlah pers.

Jika terjadi masalah hukum terkait konten yang merugikan pihak lain, salah satunya melalui UU **Informasi dan Transaksi Elektronik** (ITE), kontributor warga bisa diperkarakan dan dipenjarakan. Menjadi berbeda jika ia merupakan produk pers atau bagian dari pers, maka kasus sengketa akan terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi melalui Dewan Pers.

Padahal keberadaannya amat penting bagi jurnalisme profesional, baik sebagai bagian dari eksistensi jurnalisme profesional yang harus selalu bersama warga, juga berkontribusi dalam menambah trafik media induknya yang berujung pada akumulasi kapital. Inilah dilema jurnalisme warga. Daftar Pustaka Adam, Ahmat. (1995). Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan, 1855-1913. Jakarta: Hasta Mitra Alan, Stuart. (2009). Histories of Citizen Journalism. Dalam Allan, Stuart.,

dan Thorsen, Einar. (Ed.). Citizen Journalism: **Global Perspectives**. New York: Peter Lang Atton, Chris. (2003). What is 'Alternative' Journalism? Journalism, Vol. 4(3): 267–272 Bagdikian, Ben H. (2004). The New Media Monopoly. Boston: Beacon Press Baran,

Stanley J. (2011). Pengantar Komunikasi Massa Literasi Media dan Budaya. Jakarta: Salemba Humanika – Mc Graw Hill Bowman, S. dan Willis, C. (2003). We Media: How Audiences Are Shaping The Future of News and Information.

The Media Center at The American Press Institute Campbell, Vincent. (2014). Theorizing Citizenship in Citizen Journalism. Digital Journalism. DOI: 10.1080/21670811.2014.937150 Eddyono, Aryo Subarkah., Faruk., dan Irawanto, Budi. (2019). Jurnalisme Warga: Liyan, Timpang, dan Diskriminatif. Jurnal Profetik. 12 (1). Gilmor, Dan. (2004). We the Media: Grassroots Journalism By the People. California: O'Reilly Media Hajek, Roman., & Stefanikova, Sandra. (2014).

Citizen Journalism Is as Old as Journalism Itself: An interview with Stuart Allan. Mediální Studia 2 , hal. 174-181. Dilihat pada 23 Oktober 2018 dari <http://orca.cf.ac.uk/id/eprint/70685> Hill, D. T., & Sen, K. (2005). The Internet in Indonesia's New Democracy. Kanada: Routledge. Hughes, W. (2010). Citizen Journalism : Historical Roots and Contemporary Challenges. Honors College Capstone Experience/Thesis Projects Kovach, Bill dan Rosenstiel, Tom. (2001).

Elemen-elemen Jurnalisme. Jakarta: ISAI Kurniawan, Moch. Nunung. (2007). Jurnalisme Warga di Indonesia, Prospek dan Tantangannya. Jurnal Makara 11 (2), hal. 71-78 Lasica, D. (2003, 7 Agustus). What Is The Participatory Journalism? Online Journalism Review. Dilihat pada 14 Maret 2017 dari: <http://www.ojr.org/ojr/workplace/1060217106.php> McChesney, Robert W. (1998). Konglomerasi Media Massa dan Ancaman Terhadap Demokrasi. Jakarta: AJI Jakarta McChesney, Robert W. (1999). Rich Media Poor Democracy.

New York: The New Press McChesney, Robert W. (2008). The Political Economy of Media: Enduring Issues, Emerging Dilemmas. New York: Monthly Review Press McChesney, Robert W. (2013). Digital Disconnet: How Capitalism is Turning The Internet Against Democracy. New York – London: The New Press. Ningtyas, Ika. (2014, 22 Desember). Demokratisasi Media Melalui Jurnalisme Warga. Remotivi.

Dilihat pada 25 Desember 2016 dari: <http://www.remotivi.or.id/amatan/33/Demokratisasi-Media-Melalui-Jurnalisme-Warga> Nugraha, Pepih. (2012a). Citizen Journalism: Pandangan, Pemahaman, dan Pengalaman. Jakarta: Penerbit Buku Kompas Oetama, Jakob. (2004). Pers Indonesia: Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus. Jakarta: Penerbit Buku Kompas Outing, Steve. (2005, 31 Mei). The 11 Layers of Citizen Journalism. Poynter.org.

Dilihat pada 14 Maret 2017 dari:

<https://www.poynter.org/2005/the-11-layers-of-citizen-journalism/69328/> Saukko, P. (2003). [Doing Research in Cultural Studies: An Introduction to Classical and New Methodological Approach](#). London: Sage Publication Wedhaswary, Inggried Dwi. (2009). [Perkembangan Jurnalisme Warga di Indonesia](#) (Studi Kasus pada Metro TV, Radio Elshinta, Kompas.com, dan Panyingkul.com). (Tesis S2).

Universitas [Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia](#).

INTERNET SOURCES:

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/319489440_Studi_Ketahanan_Sosial_Pada_Pemuda_Penyelenggara_Festival_Film_Dokumenter_2015

<1% - <https://aieluwuk.blogspot.com/2010/03/produksi-media-cetak.html>

<1% - <https://fikom-jurnalistik.blogspot.com/2011/>

<1% -

https://clio1673.blogspot.com/2013/03/dibuat-untuk-memenuhi-uas-mata-kuliah_3268.html

<1% -

<https://vivixtopz.wordpress.com/artikel-islam/zionisme-analisis-sejarah-dan-perkembangannya/>

<1% - <https://www.mamamia.com.au/brenton-tarrant-shooting/>

<1% -

https://www.researchgate.net/publication/220427075_Why_the_Internet_is_Bad_for_Democracy

<1% - <https://www.greaterkashmir.com/news/opinion/citizen-journalism/>

<1% -

<https://www.prnewswire.com/news-releases/finup-group-csr-apply-science-and-technology-to-fulfill-social-welfare-300659982.html>

<1% -

<https://hot.detik.com/art/d-2545541/di-rumah-sahrul-gunawan-televisi-cuma-ada-satu>

<1% - <https://www.fanfiction.net/s/12804766/1/Three-Lines-Love-Letter>

<1% -

<https://www.beritasatu.com/hiburan/22330/hafalan-shalat-delisa-film-tentang-tsunami-aceh-rasa-sukabumi>

<1% -

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/12/26/nh6388-serbaputih-wapres-hadiri-puncak-peringatan-10-tahun-tsunami-aceh>

<1% - <https://model-daerah.blogspot.com/2015/01/titik-balik-bencana-tsunami.html>

<1% -

https://mudah-bahasaindonesia.blogspot.com/2015/10/contoh-kalimat-menggunakan-kata-kata_12.html
<1% - https://kabar-terhangat.blogspot.com/2018/08/liputan6-rss2-feed_28.html
<1% - <https://www.dewanpers.or.id/kebijakan/peraturan>
<1% - <https://noterozein.blogspot.com/>
<1% - <https://issuu.com/ayep3/docs/250513>
<1% - <https://makalahtafsirhadis.blogspot.com/2017/06/analisis-data.html>
<1% -
<https://imtakusaytaufik.wordpress.com/2015/01/19/pengaruh-kompetensi-pedagogik-dan-motivasi-kerja-terhadap-kinerja-guru-sma-di-brebes-selatan/>
<1% - <https://challurantaz.blogspot.com/>
<1% - <https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/page/192/>
<1% -
https://www.academia.edu/35579972/Proses_Penyajian_Jurnalisme_Warga_pada_Rubrik_Indonesiana_Koran_Tempo
<1% - <https://prihasmoro1a-arga.blogspot.com/2009/01/>
<1% - <https://adiprakosa.blogspot.com/2008/01/sistem-pers-indonesia.html>
<1% - <https://id.scribd.com/doc/226911434/Buku-Profil-Dewan-Pers>
<1% - <https://scientiarum.com/2008/11/05/hargai-pesparawi/>
<1% - https://issuu.com/tifafoundation/docs/kepemilikan_dan_intervensi_siaran
<1% -
<https://anysws.blogspot.com/2014/04/makalah-bentuk-demokrasi-indonesia.html>
<1% -
https://www.academia.edu/30909956/Ekonomi_Politik_Media_Televisi_Berita_Sebagai_Ruang_Publik
<1% -
<https://rhiaunyuunyu.blogspot.com/2012/03/jenis-dan-persebaran-fauna-di-indonesia.html>
<1% -
<https://anisatulKhoirapriilia.blogspot.com/2014/12/sejarah-intelektual-tentang-feodalisme.html>
<1% -
<https://pezat51newscommunity.blogspot.com/2013/02/jurnalisme-warga-negara-citizen.html>
<1% - <https://globallinkmedia.blogspot.com/2009/12/>
<1% - <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Indonesia>
<1% - <https://tirto.id/netflix-di-indonesia-dijegal-sebelum-berkembang-Dd>
<1% -
<https://blogkeandhi.blogspot.com/2010/06/sejarah-media-massa-di-indonesia-e.html>
<1% -

<https://amiswar.blogspot.com/2007/10/menggagas-palu-blogger-community.html>
<1% -
<https://kumparan.com/@kumparanhits/mantan-artis-cilik-yang-eksis-hingga-kini-1538651765299464955>
<1% -
<https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/419-artikel-teknologi-informasi/20274-bitcoin-peluang-atau-ancaman>
<1% -
https://iddamahfiroh.blogspot.com/2015/01/migrasi-dan-dampak-pada-permasalahan_6.html
<1% -
<https://belajar-jujur.blogspot.com/2018/10/pemerintah-arab-saudi-anti-kritik-khas-islam.html>
<1% -
<http://www.remotivi.or.id/amatan/33/Demokratisasi-Media-Melalui-Jurnalisme-Warga>
<1% - <https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/tag/esai-2/page/4/>
<1% -
<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/09/27/kebebasan-berpendapat-masih-rawan-dibungkam-380916>
<1% - <https://adieynugroho.blogspot.com/2013/>
<1% -
https://mafiadoc.com/laporan-pengkajian-hukum-tentang-menginventarisir-_5984283f1723ddd069faf570.html
<1% - <https://bambangdssmagasolo.blogspot.com/2011/10/resensi.html>
<1% - <https://id.scribd.com/doc/21199126/si-digital-17102009>
<1% -
<https://kumparan.com/ilham-bintang/pers-di-era-digital-idealistis-atau-realistic-1548152244201924252>
<1% -
<https://www.antaranews.com/berita/100958/lbh-kebebasan-pers-masih-terancam>
<1% -
<http://selamatkanbumi.com/id/kronologi-perlawanan-warga-padarincang-vs-aqua-dan-one/>
<1% - <https://maulinissa.blogspot.com/>
<1% - https://www.academia.edu/11354096/Citizen_Journalism_annotated_bibliography
<1% - https://www.academia.edu/9000516/Gender_dan_Media
<1% -
https://www.researchgate.net/publication/260208500_WHOSE_NEWS_WHOSE_VALUES_Citizen_journalism_and_journalistic_values_through_the_lens_of_content_creators_and_consumers

<1% - https://www.kdm.aau.dk/digitalAssets/298/298158_rdf_6.sem_iv_14_cph.rdf

<1% - <https://henrysubiakto.blogspot.com/2012/02/>

<1% - http://www.fampeople.com/cat-robert-w-mcchesney_2

<1% - http://www.self.gutenberg.org/articles/eng/Robert_W._McChesney

<1% - <https://communicare-santi.blogspot.com/2007/>

<1% -

<https://www.potteryptsd.co.uk/book60136c9/doing-research-in-cultural-studies-an-introduction-to-classical-and-new-methodological-approaches-introducing-qualitative-methods-series.pdf>

<1% - <https://jurnal.ugm.ac.id/>